KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NOMOR 964/KPTUN.W2-TUN3/SK.OT1.6/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjaga penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah, maka pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
b. bahwa mutasi dan promosi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan perubahan susunan hakim sehingga perlu dilakukan penyesuaian Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
c. bahwa, mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG;

KESATU : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 453/KPTUN.W2-TUN3/SK.OT1.6/IV/2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tanggal 9 April 2026 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KEDUA : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara rutin;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 13 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NOMOR : 964/KPTUN.W2-TUN3/SK.OT1.6/VII/2026
TANGGAL : 13 JUNI 2026

TIM KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Penanggungjawab	RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.	Ketua
2.	Ketua Tim	RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H.	Wakil Ketua
SEKRETARIAT TIM			
1.	Ketua	TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M.	Sekretaris
2.	Anggota	FITRI INDRIATI NOFITA, S.Kom.	Klerek – Pengolah Data dan Informasi
3.	Anggota	PRAYOGA ANDI DARUSSALAM, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana
DOKUMEN KONTROL			
1.	Ketua	Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.	Hakim
2.	Anggota	JIMMY FERNANDO D. SIANTURI, S.H., M.H.	Juru Sita Pengganti
3.	Anggota	IMAD AQIL, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan
4.	Anggota	LUQMAN NUL HAQIM, S.Kom.	Penata Layanan Operasional
KELOMPOK KERJA KOMPONEN PENGUNGKIT MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Ketua I	MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H., M.H.	Hakim
2.	Ketua II	BERDYAN SHONATA, S.H.	Hakim
3.	Sekretaris	MOHAMMAD SOLEH, S.H.	Panitera Pengganti
4.	Anggota	DIAN KUSPRIYATNO, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
5.	Anggota	SUMARNI ELPRIDA SIANIPAR, S.H.	Juru Sita Pengganti
6.	Anggota	MGS HASYIM	Penata Layanan Operasional
KELOMPOK KERJA KOMPONEN PENGUNGKIT PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Ketua	SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.	Hakim
2.	Sekretaris	ASWIRMAN, S.H., M.H.	Panitera
3.	Anggota	WIRDAYATI, A.Md.	Panitera Pengganti
4.	Anggota	JUNITA NINGSIH, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan
5.	Anggota	AHMAD RULI HIDAYAT, A.Md.	Dokumentalis Hukum
KELOMPOK KERJA KOMPONEN PENGUNGKIT PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Ketua	SAHIBUR RASID, S.H., M.H.	Hakim
2.	Sekretaris	SUFI ARYANI, S.E.	Kasubag. Kepegawaian, Organsisasi dan Tata Laksana

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3.	Anggota	HAMBALI, S.H., M.H., MPA.	Panitera Pengganti
4.	Anggota	PERINA NUR ASSYIFA, S.I.P.	Analis SDM Aparatur
5.	Anggota	MA'ANI, S.Pd.I.	Penata Layanan Operasional
KELOMPOK KERJA KOMPONEN PENGUNGKIT PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Ketua	MARIA PINGKAN TELEW, S.H., M.H.	Hakim
2.	Sekretaris	MASURI, S.E.	Kasubag. PTIP
3.	Anggota	AGUS SUSANTO, S.H.	Panitera Pengganti
4.	Anggota	RANDY SETIA PUTRA, S.Kom.	Pranata Komputer
5.	Anggota	ASEP SYAHRUDIN, S.E.Sy.	Penata Layanan Operasional
KELOMPOK KERJA KOMPONEN PENGUNGKIT PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Ketua	ULIA ALBA, S.H., M.H.	Hakim
2.	Sekretaris	ELVINA R. TAMPUBOLON, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum
3.	Anggota	HELVAN SUBIA EFFENDI, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan
4.	Anggota	MELIN SIMORANGKIR, S.H.	Analis Perkara Peradilan
5.	Anggota	M. ANWAR HUSAIN	Operator Layanan Operasional
KELOMPOK KERJA KOMPONEN PENGUNGKIT PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ketua I	LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.	Hakim
2.	Ketua II	MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.	Hakim
3.	Sekretaris	TUTI ALAWIYAH, S.E., M.H.	Kasubag. Umum dan Keuangan
4.	Anggota	SITI NURLAELIYAH, S.H.	Panitera Pengganti
5.	Anggota	JAPAR SAHRONI, S.A.P.	Penata Layanan Operasional
6.	Anggota	MUHTADI, S.P.	Penata Layanan Operasional
KELOMPOK KERJA KOMPONEN HASIL			
1.	Ketua I	RORY YONALDI, S.H., M.H.	Hakim
2.	Ketua II	PUTRI SUKMIANI, S.H., M.H.	Hakim
3.	Sekretaris	ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara
4.	Anggota	SUSHARDIYANTO WIBOWO, S.E.	Penata Layanan Operasional
5.	Anggota	SAPRUDIN, S.H.	Penata Layanan Operasional
6.	Anggota	ARIEF FEBRIANTO, S.M.	Penata Layanan Operasional

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.